



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 08 Agustus 2017

Halaman: 13

The screenshot shows a newspaper article with the following content:

Instansi Keroyok Pengentasan Kemiskinan

YOGYA, TRIBUN - Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta yang masih tinggi akan diselesaikan dengan beragam cara. Salah satunya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya akan mengintegrasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan, saat ini program pengentasan kemiskinan masih dijalankan secara sendiri-sendiri oleh OPD.

● ke halaman 14

Instansi Keroyok Pengentasan

● Sambungan Hal 13

Hal inilah yang membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif.

"Kami punya rencana kalau pengentasan kemiskinan ini diintegrasikan oleh setiap OPD maka akan lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, data kemiskinan juga harus disamakan terlebih dahulu," ujar Heroe, Minggu (6/8).

Menurut Heroe, total anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan cukup besar. Total anggaran dari APBD Kota Yogyakarta 2017 saja mencapai sekitar Rp92,3 miliar. Anggaran tersebut, belum ditambah anggaran dari Pemda DIY dan pemerintah pusat. Sehingga untuk lebih efektifkan penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran, program harus diintegrasikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin mencapai 8,75 persen. Hal ini lebih tinggi dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 yang menargetkan angka kemiskinan mencapai 8,4 persen. "Jadi nanti konsepnya pengentasan kemiskinan akan dikeroyok oleh seluruh instansi," jelasnya.

Heroe pun meminta ada penyamaan data kemiskinan. Sejauh ini, pemerintah kota Yogyakarta memiliki data penduduk miskin dalam bentuk data pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Ada pula data dari pusat. "Penggunaan data yang sama menjadi penting agar sasaran program menjadi lebih merata," ulasnya.

Dia juga menambahkan, dengan integrasi ini, Pemkot bisa mengetahui secara lebih jelas sasaran yang dituju termasuk jenis kegiatan yang akan dilakukan, sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih.

Menurutnya, beberapa program seperti pendidikan, rumah yang layak, pekerjaan, dan kesehatan akan menjadi program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Sementara, pemerintah juga berharap ada peningkatan peran serta pengusaha di wilayah. Hal ini untuk program pengentasan pengangguran.

Para pengusaha ini yang memiliki usaha menengah dan usaha mikro kecil di wilayah bisa mempekerjakan warga di sekitar. Menurutnya, konsep pengentasan kemiskinan ini nantinya adalah gotong royong bersama komunitas masyarakat.

Jangan pasif

Pihaknya pun meminta warga miskin untuk tidak pasif pada program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Namun, warga penerima manfaat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan dan berusaha agar tetap mencukupi kebutuhan.

"Warga jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Namun, bagaimana caranya keluar dari zona miskin. Karena, jika hanya mengandalkan bantuan, bisa saja bantuan itu sewaktu-waktu dihentikan," tegasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005